

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) BPK RI Semester I Tahun 2015*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Penduduk Indonesia menurut provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*, diakses 29 Maret 2016, <<https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267>>.
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut provinsi, 2000-2013 (persen)*, diakses 10 April 2016, <<https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1625>>.
- Bastian, I., 2006, *Sistem akuntansi sektor publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Creswell, J.W., 2014, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4th Edition, Thousand Oaks, California.
- Haryadi, E.S., Kamaliah, & Ratnawati, V., 2015, 'Analisis pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut', *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, hh. 184 – 195.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A., 2011, *Qualitative research methods*, SAGE, London.
- Herawaty, M. & Hoque, Z., 2007, 'Disclosure in the annual reports of Australian government departments', *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 3, Iss. 2, hh. 147 – 168.
- Heriningsih, S. & Ruserlistyani, 2014, 'Pengungkapan laporan keuangan, kelemahan SPI, dan ketaatan pada perundang-undangan dianalisis dari opini auditor', Seminar Nasional dan Call For Paper SiNAU 3, Fakultas Ekonomi UPN Veteran, Yogyakarta.
- Hilmi, A.Z. & Martani, D., 2012, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi', Seminar Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, *Standar akuntansi keuangan per 1 juni 2012*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

- Iqbal, M., 2016, 'Menilai kecukupan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dalam perumusan opini BPK', tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
- Martani, D. & Lestiani, A., 2012, 'Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia', *Global Review of Accounting and Finance*, Vol. 3, No. 1, hh. 67 – 84.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*, 2010.
- Rini & Sarah, A., 2014, 'Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia', *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, No. 1.
- Ritonga, I.T., 2010, *Reviu laporan keuangan pemerintah daerah*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta.
- Ritonga, I.T. & Suhartono, E., 2012, *Akuntansi keuangan daerah*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta.
- Ryan, C., Stanley, T., & Nelson, M., 2002, 'Accountability disclosures by Queensland local government councils: 1997 – 1999', *Financial Accountability & Management*, Vol. 18, No. 3, hh. 261 – 289.
- Sekaran, U. & Bougie, R., 2014, *Research methods for business: a skill-building approach*, 6th Edition, John Wiley & Sons Ltd., United Kingdom.
- Setyaningrum, D. & Syafitri, F., 2012, 'Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hh. 154 – 170.
- Sugiyono, 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Suwardjono, 2005, *Teori akuntansi: perekayasaan pelaporan keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Suwarjono, P., 2016, 'Analisis tingkat pengungkapan akun persediaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa', tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 2004.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah, 2010.

Windarsih, D., 2015, 'Hubungan kualitas reviu laporan keuangan dengan temuan pemeriksaan BPK pada pemerintah kabupaten/kota se-DIY', tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.